



**RUMUSAN USULAN
RENCANA AKSI
OPEN GOVERNMENT INDONESIA-CSO
2018-2020**

RUMUSAN USULAN RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP INDONESIA¹

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka
(Civil Society Organizations for Open Government Partnership—CSO OGP)

Jakarta, 20 Januari 2018

Sektor dan Lingkup Isu

Ada empat sektor penting yang akan menjadi perhatian masyarakat ke depan. Sektor ini berkaitan dengan *kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan desa*. Pada isu kemiskinan yang melingkupi program-program social yang tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan pendataan, pendistribusian, hingga pemanfaatan KIS, KIP, KKS dan subsidi lainnya masih bermasalah.

Terkait kesehatan, banyaknya pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan standard; alur layanan tidak jelas, biaya tidak jelas, fasilitas kesehatan tidak lengkap. Hal ini hampir terjadi di berbagai daerah (data LAPOR 2016-2017). Untuk isu pendidikan, masalah yang dihadapi adalah data pokok pendidikan (dapodik) yang bermasalah. Dapodik masih banyak manipulasi, belum intergasi dengan baik, tidak update dan minim integritas. Padahal dapodik menjadi acuan utama dalam penyusunan program-program pendidikan dari pusat hingga daerah.

Sementara isu terakhir terkait pembangunan di wilayah desa. Problem utamanya mengenai pengelolaan keuangan desa. Belum adanya transparansi penggunaan dana desa secara menyeluruh, sehingga memunculkan kecurigaan praktik korupsi di desa. Di beberapa desa, warga tidak dilibatkan dalam proses musyawarah terkait pengelolaan dana desa.

Proses Penyusunan Rencana Aksi

Untuk rumusan usulan rencana aksi berdasarkan pada beberapa kriteria :

- Relevansi, artinya usulan renaksi masih penting dengan persoalan krusial yang akan dihadapi pada tahun berikutnya. Hal ini dengan memproyeksikan permasalahan secara social, ekonomi dan politik.
- Delivery, artinya usulan renaksi dapat diselesaikan dengan ukuran indicator yang bisa ditetapkan

¹ Usulan ini disusun oleh Darwanto berdasarkan hasil FGD tanggal 6 November 2017 dan 30 Januari 2018 yang dihadiri Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka : Mappi FHUI, Media Link, ICEL, PATTIRO, PWYP, LSPP, Seknas FITRA, Perludem, INFID, Kopel, ICW, YAPPIKA). Hasil akhir disunting oleh Sekretariat CSO-OGP.

- Kemanfaatan / daya ungkit besar, usulan aksi diharapkan dapat menyumbang peran yang besar terhadap persoalan serius yang sedang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan dan layanan dasar public.
- Partisipasi masyarakat sipil, usulan aksi akan menumbuhkan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sampai pada tahap kolaborasi dan pelibatangannya dalam pengambilan kebijakan public.
- Ambisius / inovatif, aksi yang diusulkan diharapkan dapat menyelesaikan hal besar dengan metode baru atau replikasi dari metode yang sudah ada dengan penyempurnaan dan disesuaikan dengan kekinian.
- efektif, aksi yang diusulkan tidak terlalu banyak namun dapat menyelesaikan persoalan utama yang dihadapi masyarakat (*problem priority*)

Usulan Renaksi

I. Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik pada proses proses *perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan* kebijakan sebagai realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik pada Kementerian Sosial, Pendidikan, Kesehatan, PUPR, LHK, Perdagangan dan Desa

| | |
|--|---|
| Persoalan Publik yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Sosial, sasaran jaminan dan bantuan social tidak tepat sasaran • Politik, program prioritas pemerintah terhadap pemenuhan hak dasar public seperti kesehatan, pendidikan, jaminan social, infrastruktur dan target perumahan social yang belum tercapai. Target Pemerintah dalam penancangan UHC di tahun 2019, saat ini baru tercapai sekitar 92,4 juta jiwa yang ditanggung oleh APBN. <p>Sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya terkait himbauan dan panduan bagi instansi public untuk melakukan konsultasi public proses proses <i>perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan</i> kebijakan sebagai realisasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Kondisi capaiannya sudah 60% instansi pemerintah sudah menerima sosialisasi</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan secara keseluruhan: layanan public pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan investasi sesuai dengan UU Pelayanan Publik. • Hasil yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ peningkatan kualitas layanan pendidikan ○ peningkatan kualitas layanan kesehatan ○ Angka kemiskinan menurun ○ Indeks kepuasan masyarakat dalam layanan public meningkat • Renaksi akan dilaksanakan lintas K/L (Bappenas, Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPERA, KLHK, Kemendesa dengan coordinator KSP. |

| | |
|--|---|
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kultur dan tata kelola pada instansi yang membidangi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup dan layanan investasi dengan meningkatnya civic engagement yang baru sebatas “inform” menjadi collaborative”. • Tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan public meningkat |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang masyarakat dalam memengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat |

2. Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat melalui mekanisme SP4N

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Sosial, National Complain Handling Mechanism yang belum menjawab akar masalah, yaitu tidak menyelesaikan persoalan yang diadukan public. <p>Pada tahun 2016-2017, terdapat 5 aksi yang berkaitan dengan SP4N. Namun renaksi yang ditetapkan belum menjawab persoalan dasar dan tujuan dalam system pengaduan ini, yaitu menurunnya persoalan layanan public yang dihadapi oleh masyarakat. Pada renaksi sebelumnya baru melakukan titik dasar dalam mekanisme pengaduan yaitu pengembangan sistem, integrasi pengaduan dan sosialisasi.</p> <p>Kondisi terkini terkait SP4N :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 60% LNS yang melakukan pelayanan public sudah aktif ○ Dari total pengaduan yang masuk sebanyak 1.180.609 pengaduan, terdisposisi sebanyak 321.854 pengaduan dan ditindaklanjuti hanya 296.844 pengaduan |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan secara keseluruhan : meningkatnya kualitas layanan public. • Hasil yang diharapkan : seluruh pengaduan layanan public melalui SP4N dapat tertangani sampai tuntas • Merupakan integrasi dari seluruh aksi sebelumnya yang berkaitan dengan LAPOR/SP4N. • Renaksi akan dilaksanakan oleh KemenPAN RB dengan lembaga terkait Kemendagri, ORI, KSP. |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan yang responsive dalam tindak lanjut aspirasi dan pengaduan public. |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat |

3. Publikasi informasi yang valid ketersediaan layanan kamar, dokter, obat dan jasa kesehatan secara *real time* baik online maupun offline pada RS milik Pemerintah dan Puskesmas

| | |
|--|---|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Sosial, informasi ketersediaan ruang rawat inap, dokter, obat dan jasa kesehatan lainnya yang belum diakses secara mudah oleh public <p>kondisi aktual saat ini, Kemenkes sudah membuat aplikasi terkait informasi online yang dapat diakses oleh public. Persoalan yang ditemui, informasi tersebut belum menjangkau ke seluruh layanan RS/Puskesmas di seluruh Indonesia, informasi yang tersedia tidak sesuai dengan kondisi factual, keengganan pemberi layanan untuk entry informasi secara real time.</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> Tujuan secara keseluruhan : meningkatnya kualitas layanan kesehatan Hasil yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> RS/Puskesmas menyediakan informasi valid terkait ketersediaan layanan kamar, dokter, obat dan jasa kesehatan lainnya secara real time, valid dan mudah diakses oleh public. Tingkat kepuasan masyarakat dalam layanan kesehatan meningkat |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan yang akuntabel dan responsive dalam layanan dasar kesehatan |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi |

II. Open Data

1. Pelaksanaan Forum Akuntabilitas Data Spasial (adanya data yang disepakati bersama oleh BIG dengan masyarakat)

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Politik, target pemerintah pusat terkait capaian perhutanan social yang masih sangat minim. <p>kondisi aktual saat ini, bahwa realisasi pemberian izin perhutanan social pada periode 2015-2017 baru tercapai 510,2 hektare atau sekitar 4% dari target yang ditetapkan seluas 12,7 hektare pada 2019 (RKP 2018).</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> Tujuan secara keseluruhan : Meningkatnya Realisasi Perhutanan Sosial Hasil yang diharapkan : adanya data yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat secara real time yang merupakan perpaduan / kolaborasi data pemerintah dan masyarakat. Sebagai kelanjutan aksi sebelumnya yang baru konsultasi public dan standar acuan terhadap peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan informasi geospasial (renaksi tercapai |

| | |
|--|---|
| | 100%) <ul style="list-style-type: none"> Renaksi akan dilaksanakan oleh BIG dengan lembaga terkait KLHK |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan nasional dan daerah terkait penyajian data spasial yang mengakomodir usulan masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya pada program prioritas pemerintah (perhutanan social) |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat |

2. Peningkatan Pemerintahan Desa yang Terbuka, Partisipatif, & Responsif

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Sosial, dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa Ekonomi, mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa Politik, Prioritas Pemerintah Pusat pada Pembangunan Perdesaan : <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi: Penguatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa: Pengelolaan aset keuangan desa dan perencanaan desa, pengelolaan sistem informasi keuangan desa <p>Sesuai dengan kesepakatan 4 Kementerian yaitu Kemendesa, Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas bahwa pada tahun 2018 Dana Desa akan diarahkan kepada pembangunan desa secara padat karya. Saat ini SKB 4 Menteri tersebut diharapkan rampung pada Desember 2018.</p> <p>Hingga saat ini, sejak dana desa digulirkan tahun 2015, 2016 dan 2017 tahap I sudah mampu menyumbang dalam pembangunan di desa. Untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa telah berhasil memperbaiki jalan desa sepanjang 121.709 km, jembatan sepanjang 1.960 km, pasar desa sebanyak 5.220 unit, membentuk BUMDesa 21.811 unit, tambatan perahu sebanyak 5.116 unit, embung sebanyak 2.047 unit dan sarana olah raga sebanyak 2.366 unit. Sedangkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sudah menghasilkan :</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>membangun penahan tanah sebanyak 291.393 unit, perbaikan air bersih sebanyak 32.711 unit, pembangunan MCK sebanyak 82.356 unit, pembangunan/pemeliharaan polindes sebanyak 6.041 unit, pemeliharaan drainase sebanyak 590.371 unit, pembangunan PAUD sebanyak 21.357, pemeliharaan posyandu sebanyak 13.973 unit dan pembuatan sumur desa sebanyak 45.865 unit (Kemendesa, Oktober 2017).</p> <p>Sementara, dalam pengelolaannya masih banyak terjadi penyimpangan yang terjadi. Evaluasi Pengawasan yang dilakukan oleh Kemendesa pada tahun 2016 menemukan 734 kasus kesalahan administrative, 367 kasus dugaan korupsi dana desa yang ditangani oleh penegak hukum.</p> <p>Pada tahun 2017, pengaduan Pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh Kemendesa terdapat 3.113 kasus dugaan penyalahgunaan dana desa, 1.024 kasus dugaan kesalahan pengelolaan dan penggunaan, 201 kasus dugaan kesalahan prosedur dan 50 kasus dugaan pungli.</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan secara keseluruhan : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dana desa, mempercepat pembangunan dari desa. • Hasil yang diharapkan : terlaksananya <i>Pro active disclosure</i> pada dokumen RPJMDesa, RKPDesa, APBDDesa dan Realisasi anggaran desa baik ikhtisar maupun detailnya di tempat-tempat strategis pada 30 Desa (1. Sumatera Barat: Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto; 2. Maluku: Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara; 3. Jawa Tengah: Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar) • Merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang baru meletakkan dasar-dasar pengelolaan keuangan desa yang baik pada lokasi program. • Untuk menambah daya dorong, sebelumnya aksi hanya dilaksanakan oleh Kemendagri, berikutnya aksi akan dilaksanakan oleh dua kementerian yaitu Kemendagri dan Desa |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan desa yang berkualitas dari segi SDM pengelolaan keuangan desa yang melibatkan partisipasi aktif warga. |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi • Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat |

3. Akuntabilitas pengelolaan anggaran program-program sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan desa

| | |
|--|---|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Sosial, problem pendataan, pendistribusian kartu KIP, KIS, KKS, hingga pemanfaatan yang masih bermasalah. Penerima subsidi listrik tidak tepat sasaran. Politik, menjadi prioritas pemerintah pusat terkait pemenuhan hak dasar warga yang berkaitan dengan program-program kesejahteraan sosial (<i>welfare</i>) <p>kondisi saat ini belum adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> Tujuan secara keseluruhan: akuntabilitas pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan layanan dasar public. Hasil yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> Kemudahan akses informasi/penyediaan informasi anggaran terkait layanan dasar sampai pada satuan tiga Munculnya partisipasi aktif public dalam mengawasi pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan layanan dasar public. Peningkatan kualitas layanan dasar warga Renaksi sebelumnya “meningkatnya keterbukaan system informasi anggaran dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Aksi dinilai berhasil 100%, namun hanya sebatas penyempurnaan fitur peta data yang terkait dengan transparansi keuangan daerah (TKD) dan Dana Desa 2016-2017. Sedangkan aksi yang berkaitan dengan data anggaran pada 6 kementerian (PUPERA, Kesehatan, Ristekdikti, Sosial, Kemenhub dan Bappenas), tidak dilaksanakan Renaksi ini akan menjadi aksi lanjutan bagi Kementerian Keuangan dengan melibatkan Kementerian terkait sebagaimana tersebut di atas. |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan nasional terkait penyajian data anggaran dasar public secara <i>real time</i> |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan layanan dasar public |

4. Penerapan e-legislasi di beberapa daerah (replikasi e-legislasi di Kota Semarang)

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Politik, sulitnya mengakses informasi pembahasan kebijakan di DPRD. <p>Kondisi saat ini, penerapan e-legislasi di Kota Semarang sudah mulai berjalan. Public secara mudah mengakses informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pembahasan dan penetapan kebijakan daerah.</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> Tujuan secara keseluruhan: seluruh informasi perencanaan, pembahasan dan penetapan kebijakan daerah dapat diakses oleh public. Hasil yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> adanya transparansi dalam perencanaan, pembahasan dan penetapan kebijakan adanya partisipasi aktif public dalam setiap pembahasan kebijakan daerah adanya kolaborasi antara public dan warga dalam pembahasan kebijakan public di daerah Aksi sebelumnya sudah mulai berjalan di Kota Semarang. Sebagai upaya pengembangan dapat dikembangkan di Kota Banda Aceh, Kota Bandung, Provinsi DKI Jakarta dan Kota Makassar. Dilaksanakan oleh Kemendagri |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan daerah yang transparan dan kolaboratif pemerintah daerah-public dalam setiap pembahasan kebijakan daerah |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat Perubahan regulasi dan peningkatan akuntabilitas masyarakat |

III. Akuntabilitas

1. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> Sosial, pengelolaan anggaran pendidikan tidak tepat sasaran karena data yang dipakai tidak update dan diduga banyak manipulasi. Politik, isu pendidikan masih menjadi program prioritas pemerintah. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | Kondisi saat ini terkait data pokok pendidikan tidak factual, sehingga program dan alokasi anggaran yang dikelola tidak menjawab persoalan prioritas yang dihadapi. |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan secara keseluruhan: pengelolaan anggaran pendidikan tepat sasaran dan berimplikasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. • Hasil yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya penguatan validasi data pokok pendidikan (dapodik) yang real time dengan melibatkan warga (forum akuntabilitas data pokok pendidikan) ○ ruang untuk koreksi data dan anggaran berdasar input dari warga • Renaksi akan dilaksanakan oleh kemendiknas dan Kemenristekdikti. |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan nasional dan daerah dalam pengintegrasian data pokok pendidikan yang menjadi acuan utama dalam pengalokasian anggaran pendidikan. |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi • Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat • Perubahan regulasi dan peningkatan akuntabilitas masyarakat |

IV. Penanganan Kemiskinan

1. One Data, Verifikasi dan Validasi melalui Forum Akuntabilitas Data pada Program-program Sosial (KIS, KIP, PKH, Subsidi Listrik, KKS)

| | |
|--|--|
| Persoalan Publik apa yang akan dijawab oleh Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Sosial, sasaran jaminan dan bantuan social tidak tepat sasaran. • Politik: tahun 2018 dan 2019, pemerintah menetapkan akan focus pada penanganan kesejahteraan public (<i>welfare</i>) • Kondisi aktual saat ini problem social masih menjadi persoalan serius. <ul style="list-style-type: none"> ○ Angka kemiskinan saat ini 10,7-10,4 dan ditargetkan 9,5-10,0 persen pada 2018 ○ Gini ration saat ini 0,397 dan ditargetkan 0,38 pada 2018 ○ IPM saat ini 70,18-70,79 dan ditargetkan 71,5 di tahun 2018 |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>Untuk program-program social :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Penerima PBI-JKN, tahun 2017-2018 dialokasi sebanyak 92,4 juta jiwa dan direncanakan akan meningkat 107,2 Juta jiwa pada tahun 2019 ○ Penerima KIP saat ini dialokasikan sebesar 19,7 juta jiwa dan akan tetap pada tahun 2019 ○ Penerima PKH, saat ini dialokasikan untuk 6 juta jiwa dan ditargetkan pada 2018 sebanyak 10 juta jiwa. <p>(RKP 2018)</p> |
| Deskripsi rencana aksi | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan secara keseluruhan: program-program social tepat sasaran • Hasil yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adanya one data untuk penerima program-program social ○ Adanya verifikasi dan validasi data secara <i>realtime</i> ○ Adanya Forum Akuntabilitas Data yang melibatkan publik • Renaksi ini akan dilaksanakan lintas K/L Kemensos, Kemendagri, Kemenkes, Kemendiknas, Kemendes, Bappenas dengan KSP sebagai coordinator. |
| Kontribusi rencana aksi dalam menyelesaikan persoalan publik | <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan kultur dan tata kelola di pemerintahan nasional/daerah terkait manajemen pengelolaan data penerima progam-program social yang terintegrasi, partisipatif dan integritas. |
| Relevansi rencana aksi dengan nilai-nilai OGP | <ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap lebih banyak informasi, kualitas dan akses publik terhadap informasi • Peningkatan peluang masyarakat dalam mempengaruhi keputusan, kultur masyarakat dan partisipasi masyarakat • Perubahan regulasi dan peningkatan akuntabilitas masyarakat |

V. Aksi Daerah

Untuk rencana aksi daerah baru yang didampingi CSO saat ini Kabupaten Wonosobo, Kota Makassar dan Kota Solok. Saat ini di masing-masing daerah tersebut sedang dalam proses penyusunan rencana aksi.



CSO OGP Indonesia 2018